

ABSTRAK

Pangan merupakan hak asasi warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Negara. Untuk mencapai swasembada pangan nasional dibutuhkan regulasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi kekinian dibidang peralihan hak atas tanah pertanian. Penelitian ini memfokuskan pada peralihan hak atas tanah pertanian melalui jual beli. Perbuatan hukum jual beli hak atas tanah pertanian yang berkaitan tanah absentee menjadi latar belakangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi peralihan hak atas tanah pertanian untuk pembangunan saat ini, mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan peralihan hak atas tanah pertanian serta menemukan rekonstruksi hak atas tanah pertanian yang berbasis nilai keadilan, sebagai alternatif penyelesaian kelemahan-kelemahan peralihan hak atas tanah pertanian. Penelitian ini akan membahas tentang konstruksi hukum peralihan hak atas tanah pertanian yang seharusnya dilaksanakan saat ini. Kelemahan-kelemahan dan solusi atas pelaksanaan peralihan hak atas tanah pertanian, rekonstruksi peralihan hak atas tanah pertanian yang berbasis nilai keadilan.

Jenis penelitian dalam disertasi ini merupakan penelitian yuridis normative. Data sekunder yang diperkuat dengan data primer sebagai sumber data penelitian ini, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisi. Tujuan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan hukum objektif dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum dan mendapatkan hukum subjektif berupa hak dan kewajiban.

Teori keadilan menjadi grand theory (teori utama), teori negara hukum sebagai middle theory, teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif sebagai applied theory (teori aplikasi).

Hasil analisis penelitian ini adalah peralihan hak atas tanah pertanian yang terkait dengan tanah absentee melalui perbuatan hukum jual beli penting untuk dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi nilai peralihan hak atas tanah pertanian atas dasar tanah pertanian wajib dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya atau buruhnya sebagai pemenuhan kedaulatan pangan/swasembada pertanian, maka kiranya perlu diadakan rekonstruksi terhadap Pasal 10 ayat (1) UUPA dan Pasal 3d PP 41 Tahun 1964. Calon pembeli tidak dibatasi satu kecamatan dimana letak tanah pertanian berada, tetapi satu Kabupaten/Kota yang melingkupi daerah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Infrastruktur jalan-jalan yang sudah bagus dan alat transportasi yang modern menjadikan jarak tempuh dari satu Kecamatan ke Kecamatan lain lebih mudah terjangkau.

**Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian, Keadilan,
Swasembada Pangan**

ABSTRACT

Food is an Indonesian citizen rights guaranteed by the State. To achieve national food self-sufficiency needed regulatory legislation corresponding to the current condition in the field of transfer of rights over agricultural land. This study focuses on the transfer of rights over agricultural land through purchase. Legal act of buying and selling land rights of agricultural related absentee land into the background.

This study aims to determine the construction of transfer of rights over agricultural land for development at this time, knowing the weaknesses of the implementation of the transfer of rights over agricultural land and find the reconstruction of the rights over agricultural land based on values of justice, as an alternative to the completion of the weaknesses of transfer of rights over agricultural land. This study will discuss the legal construction of the transfer of rights over agricultural land that should be implemented at this time. Weaknesses and solutions for the implementation of the transfer of rights over agricultural land, reconstruction of the transfer of rights over agricultural land based on values of justice.

This type of research in this dissertation is a normative juridical research . Secondary data reinforced with primary data as a source of research data, for further analysis were analyzed descriptively. The purpose of normative legal research to get objective laws by conducting research on legal issues and get a subjective legal rights and obligations in the form.

The theory of justice into a grand theory (major theory), the theory of state law as a middle theory, legal theory and the development of progressive legal theory as applied theory (theory application).

The results of analysis of this study is the transfer of rights over agricultural land associated with absentee land through a legal act of buying and selling is important to do the reconstruction. Reconstruction of the value of transfer of rights over agricultural land on the basis of agricultural land shall be done actively by their owners or their workers as the fulfillment of food sovereignty/self-sufficiency in agriculture, it would need to hold the reconstruction of Article 10 paragraph (1) and Article 3d BAL PP 41 of 1964. Prospective buyers not limited to one district where the location of the farm is located, but the district/city that surrounds the work area District land Office/City. Infrastructure roads already nice and modern transportation means to make the distance from one District of the District to another more easily affordable.

**Keywords : Transfer of Rights to Land Agriculture, Justice,
Food Self-Sufficiency**